

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	vi
SAMBUTAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR	viii
SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA	xi
KONSEP PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI	
✓ Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Menuju Era Ekolabel	1 ✓
<i>Titus Sarijanto</i>	
✓ Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi Menuju Era Sertifikasi Ekolabel	11
<i>Fakultas Kehutanan IPB</i>	
Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	26 ✓
<i>Lili Hasanudin</i>	
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Menyongsong Era Ekolabel Abad 21	34
<i>Abbas Adhar</i>	
✓ Tinjauan Secara Komprehensif Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari. Konsep dan Permasalahannya	42
<i>Soeyitno Soedirman</i>	
Menuju Pengelolaan Hutan Lestari	50
<i>Zahrial Coto</i>	
PERMASALAHAN DALAM MENUJU PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI	
✓ ✓ Aspek Ekologi/Lingkungan dalam Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari	56 ✓
<i>Ishemat Soerianegara</i>	

Permasalahan Teknis Kehutanan dalam Mencapai Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Menuju Era Ekolabel 66
Enang Zainal Abidin

Aspek Kepastian dan Keamanan Sumberdaya Hutan dan Aspek Kelestarian Produksi Serta Permasalahannya dalam Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Menuju Era Ekolabel pada Tingkat Manajemen Unit HPH 70
Nana Suparna

Permasalahan Ekonomi dalam Mencapai Sistem Pengelolaan Hutan Lestari Menuju Era Ekolabel 81
Eggi Sudjana

Aspek Hukum Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi 90
Nurman Tasman

STRATEGI UNTUK MENCAPAI TINGKAT PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI

Strategy for Sustainable Forestry Management 100
Herman Haeruman Js.

Sertifikasi Ekolabel Manajemen Hutan Lestari : Suatu Paparan Permasalahan Penjabaran Kerangka Konseptual 127
Riga Adiwoso Suprpto

Strategi untuk Mencapai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Menuju Era Ekolabel 144
Hendarsun Surya Sanusiputra

Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari pada Tingkat Satuan Operasional 152
Agus Setyarso

LITBANG untuk Menunjang Pengembangan Hutan Alam Produksi 159
Ahmad Memet Satari

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 161
Mulyadi A.T. dan Alastair I Fraser

Strategi Mencapai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	176
<i>Donald Tobing</i>	
Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove Lestari Menuju Era Ekolabel.	190
<i>Yayasan Mangrove Indonesia</i>	
Manajemen Hutan Lestari dalam rangka Penerapan Ekolabel pada Hutan Produksi di Tahun 2000 : Studi Kasus HPH di Irian Jaya	209
<i>Frans Wanggai, Max J. Tokede, Paria Hadi dan M. Natzir Thaib</i>	
Manajemen Hutan Mangrove di Indonesia	219
<i>Cecep Kusmana</i>	
Kegiatan CIFOR dalam Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Menuju Era Ekoabel	228
<i>Rinekso Soekmadi</i>	

TEKNIK KEHUTANAN UNTUK MENUNJANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Ukuran Kelestarian Hasil dalam Pengusahaan Hutan Alam Produksi	236
<i>Endang Suhendang</i>	
Ukuran Kenormalan pada Hutan Tidak Seumur	249
<i>Endang Suhendang</i>	
Metode Pengaturan Hasil Berdasarkan Jumlah Pohon untuk Pengusahaan Hutan Tidak Seumur	264
<i>Endang Suhendang</i>	
Peranan Sistem Silvikultur dalam Melestarikan Hutan Alam	277
<i>Dwisusanto</i>	
Pembuatan Jalan Sarad yang Terencana Sebagai Salah Satu Langkah Strategis untuk Mencapai Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari di PT ITCI	287
<i>Yosef Ruslim</i>	

POTENSI EKOSISTEM HUTAN

Sumber Hayati Hutan Indonesia	297
<i>Rubini Atmawidjaja</i>	
Permasalahan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Hutan Pro- duksi	307
✓ <i>Yanto Santosa dan Haryanto</i>	
✓ Diversitas dan Tipologi Ekosistem Hutan yang Perlu Dilestarikan ...	325
<i>Yanto Santosa</i>	
Diversifikasi Hasil Hutan Non Kayu Tumbuhan Obat Melalui Penge- lolaan Terpadu Kompleksitas Keanekaragaman Hayati di Kesatuan Pengelolaan Hutan Alam Produksi	339
<i>Ervizal A.M. Zuhud</i>	
✓ Peranan Aspek Tanah dalam Pengusahaan Hutan Lestari	346
<i>Omo Rusdiana dan Basuki Wasis</i>	

INSTITUSI DAN KETENAGAKERJAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Pemberdayaan Rimbawan dalam Pengusahaan Hutan Produksi	351
<i>Yanto Santosa dan Burhanuddin Mas 'ud</i>	
Penekanan Eksistensi Rimbawan dalam Mengelola Hutan Secara Lestari	359
<i>Ridwan Yahya dan Eliyin</i>	

PENERAPAN EKOLABEL DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRO- PRODUKSI LESTARI

Persiapan Ekolabel di Indonesia	364
<i>Hendro Prastowo</i>	
Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan : Kunci Menuju Era Ekolabel	372
<i>Haryanto</i>	

Penerapan Ekolabel Dipandang dari Sudut Pemanenan Kayu	381
<i>Rachmatsjah Abidin</i>	
Strategi untuk Mencapai Pengelolaan Hutan Produksi yang Lestari dalam Menuju Era Ekolabel	389
<i>Alastair I Fraser</i>	
Beberapa Catatan Hasil Pengamatan Pelaksanaan Aspek Perencana- naan Hutan dan Pembinaan Hutan dalam rangka Penerapan Ekola- bel di Hutan Produksi	396
<i>Emi Karminarsih dan Lailan Syaufina</i>	
✓ RUMUSAN SIMPOSIUM	400

PENGANTAR

Permasalahan yang muncul di sekitar pengelolaan sumberdaya alam, termasuk di dalamnya sumberdaya hutan, akan senantiasa bergulir dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Macam dan kualitas permasalahan ini akan makin meningkat sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan manusia terhadap manfaat sumberdaya hutan sebagai akibat dari terus meningkatnya jumlah penduduk, kualitas hidup manusia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

Salah satu permasalahan yang sangat menonjol adalah permasalahan yang timbul akibat pemanfaatan hutan produksi yang sangat intensif, sehingga memberikan dampak ekonomis, ekologis dan sosial budaya yang sangat besar, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, dan mengundang polemik yang tak kunjung selesai di kalangan masyarakat, di tingkat nasional dan internasional. Akibatnya, berbagai macam tuntutan dan persyaratan dalam perdagangan hasil hutan, terutama kayu, berikut komoditi turunannya dimunculkan oleh masyarakat konsumen, terutama masyarakat konsumen di negara-negara maju. Penerapan ekolabel pada berbagai produk turunan dari hasil hutan sebagai pengakuan terhadap tingkat pengelolaan yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, dari hutan yang menjadi sumber bahan bakunya dapat dipandang sebagai puncak dari berbagai tuntutan masyarakat internasional tersebut.

Harus diakui, tanpa mengurangi penghargaan terhadap langkah-langkah nyata yang telah diambil oleh pemerintah dan pengusaha, permasalahan yang dihadapi dalam menuju pengelolaan hutan berkelanjutan, terutama pengusaha hutan alam produksi, di Indonesia masih menganga dengan lebar dan tantangan pun masih membentang. Oleh karenanya, kejelasan konsep, kelengkapan informasi permasalahan dan ketepatan strategi yang diambil, akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam mencapai pengelolaan hutan alam produksi lestari di Indonesia. Terdorong oleh kenyataan dan keyakinan seperti itulah buku yang berisi makalah-makalah yang ditulis dalam Simposium Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi ini diterbitkan. Isi buku ini diharapkan akan dapat mengungkapkan secara umum mengenai konsep, gambaran permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil dalam mencapai tingkat pengelolaan hutan alam produksi secara lestari menuju era ekolabel.

Mudah-mudahan isi buku ini dapat memperkaya khazanah Ilmu Kehutanan, khususnya yang berkenaan dengan hutan di Indonesia, dan menjadi tambahan bekal dalam mengelola hutan alam tropis yang tak ternilai harganya, bagi Bangsa Indonesia pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya.

Patut disadari bahwa permasalahan tuntutan penerapan ecolabel di hutan produksi, sebagai alat ukur dan kendali dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, tidak saja sebagai suatu perwujudan komitmen politik dan sikap proaktif kita dalam memasuki era pasar bebas, akan tetapi lebih daripada itu sebagai suatu perwujudan komitmen moral dan etik Bangsa Indonesia, khususnya para rimbawan Indonesia terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan bijaksana yang senantiasa memperhatikan kepentingan generasi sekarang tanpa melupakan kepentingan generasi mendatang.

Seperti kita ketahui, upaya mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penerapan ecolabel di hutan produksi telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, baik menyangkut kriteria, indikator, mekanisme dan organisasi sertifikasi, penyiapan sumberdaya manusia, dan sebagainya. Semua upaya tersebut masih memerlukan pemahaman dan kajian bersama, baik pada tingkat akademik keilmuan maupun pada tingkat praktis operasional.

IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi pertanian, khususnya Fakultas Kehutanan yang bertugas dalam pengembangan IPTEK dan penyiapan sumberdaya manusia di bidang kehutanan, selalu tanggap untuk memberikan kontribusi nyata. Pelaksanaan Simposium Nasional ini pada dasarnya merupakan suatu perwujudan panggilan tugas dan tanggungjawabnya dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan dimaksud.

Hadirin sekalian.

Perlu pula kita pahami dan hayati bersama bahwa Permasalahan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan bukan saja sebagai persoalan teknis akademis, melainkan yang lebih penting dan mendasar adalah harus dihayati sebagai persoalan komitmen etik dan moral kita semua terutama para rimbawan Indonesia dalam praktek pengelolaan hutan. Oleh karena itu, forum Simposium Nasional Penerapan Ecolabel di Hutan Produksi ini hendaknya tidak saja dimaksudkan sebagai forum komunikasi akademis dan tukar-menukar pengalaman untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan kerangka konseptual maupun operasional penerapan ecolabel di hutan produksi, tetapi lebih daripada itu harus juga dilihat sebagai forum komunikasi hati nurani dan pemantapan langkah serta komitmen etik dan moral para rimbawan, akademisi, praktisi, pengusaha maupun birokrat.

Sebagai Rektor IPB, saya menyampaikan penghargaan kepada Fakultas Kehutanan IPB bersama-sama dengan Yayasan Gunung Menghijau dan Yayasan

Pendidikan Ambarwati, yang telah mengambil prakarsa untuk melaksanakan simposium ini yang dikaitkan dengan memperingati Tahun Emas Kemerdekaan Republik Indonesia. Secara khusus, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Departemen Kehutanan yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada IPB untuk melaksanakan tugas yang penting ini. Kepada semua pihak yang telah memungkinkan terselenggaranya simposium ini juga saya sampaikan terima kasih.

Akhirnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bersimposium kepada semua peserta. Semoga simposium ini berhasil merumuskan pikiran dan langkah-langkah konstruktif dalam menunjang upaya pengelolaan hutan secara berkelanjutan memasuki era ekolabel, sebagai bagian integral dari upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Selamat bersimposium, semoga Allah SWT selalu melindungi dan meridhoi semua ikhtiar kita.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 10 Agustus 1995
Rektor IPB,

Prof. Dr. Ir. H. Sitanala Arsyad

SAMBUTAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Para peserta simposium dan para undangan yang saya hormati.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang atas ridho-Nya kita dapat berkumpul untuk melaksanakan simposium yang penting ini.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Gunung Menghijau atas inisiatif dan kesungguhannya dalam berpartisipasi untuk menyumbangkan pikiran-pikiran tentang peningkatan pengelolaan hutan di Indonesia, dan persiapan pelaksanaan ekolabel serta sertifikasi, yang rumusannya kini sedang dalam proses pemantapan.

Saudara-saudara.

Kita mengetahui bahwa masyarakat global sangat peduli terhadap masa depan hutan dunia. Kita dapat mengatakan bahwa salah satu hasil nyata dari sidang *Commission on Sustainable Development* (CSD) yang diselenggarakan pada bulan April 1995 di New York, adalah kesepakatan untuk membentuk *Intergovernmental Panel on Forest*. Tugasnya adalah merumuskan saran-saran tentang peningkatan pengelolaan hutan dunia yang terlanjutkan. Pada sidang ke-3 CSD tersebut, antara lain telah saya sampaikan tentang keperluan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), yang dengan menggunakan jenis unggulan lokal superior, dapat meningkatkan fungsi lingkungan dan sosial-ekonomi hutan.

Di tingkat nasional, kita meyakini bahwa peranan hutan sangat strategis. Kehutanan selain merupakan penghasil devisa terbesar kedua, juga berperan dalam melestarikan lingkungan dan menjadi pendukung kekuatan sosial-ekonomi Bangsa Indonesia.

Kelestarian hutan dan pelaksanaan sertifikasi hasil hutan sudah merupakan hal yang mutlak perlu, mengingat bahwa kesadaran manusia akan pentingnya lingkungan hidup telah menuntutnya sebagai syarat utama. Namun, sampai kini masyarakat internasional masih memperdebatkan tentang rumusan dan ketentuan pemberlakuan sertifikasi kayu yang diperdagangkan. Di berbagai negara

Eropa telah terjadi perkembangan yang cenderung ingin memberlakukan secara sama antara kayu tropis dan kayu bukan tropis. Dengan demikian maka penerapan sertifikasi akan bersifat menyeluruh.

Sebagaimana kita ketahui, untuk dapat menciptakan rumusan tentang sertifikasi hutan dan produknya, diperlukan kriteria dan indikator pengelolaan hutan terlanjutkan yang diakui secara internasional. Hal ini dibicarakan pula dalam forum *Committee on Forest* (Cof) pada bulan Maret 1995 dan sidang CSD pada bulan April 1995. Banyak pihak yang telah menyusun rumusan tentang kriteria dan indikator pengelolaan hutan lestari. Karena itu kita berpendapat bahwa kini sudah saatnya menuntaskan harmonisasi kriteria dan indikator tersebut, mengingat bahwa norma kelestarian hutan senantiasa mengandung kekhususan bagi setiap negara atau wilayah.

Dengan langkah harmonisasi itu diharapkan beberapa konsep tentang kriteria dan indikator tersebut dapat memperoleh pengakuan dari semua pihak, sehingga pelaksanaan ekolabel dan sertifikasi bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Namun demikian, menurut hasil pemantauan Departemen Kehutanan, melalui sidang-sidang internasional, masih banyak negara yang tidak menyetujui ide harmonisasi antara kriteria dan standar pengelolaan hutan secara lestari. Beberapa negara berkembang bahkan menganggap bahwa ide sertifikasi itu masih terlampau awal.

Dalam hal ini, kita merasa lega bahwa sebagai anggota ITTO, Indonesia telah memiliki beberapa konsep tentang kriteria dan indikator untuk tingkat nasional maupun lokal (*national level* dan *management unit level*). Tentu saja, kemantapan ini di antaranya telah didukung oleh pengelolaan hutan kita yang melaksanakan *sustainable forest management*, terutama pada hutan jati di Pulau Jawa sejak ratusan tahun yang lalu.

Saudara-saudara.

Saya yakin, sertifikasi kayu secara cepat atau lambat akan menjadi suatu keharusan dalam rangka mencapai **ITTO Objective Year 2000** yang telah dicanangkan di Bali pada tahun 1990 yang lampau. Sebagaimana diketahui, pada tahun ini ITTO sedang mengadakan evaluasi lima tahunan (1990-1995) terhadap upaya pencapaiannya oleh negara-negara anggota.

Berhubung semakin dekatnya tahun 2000 maka saya menghimbau semua pihak agar memikirkan upaya yang nyata dan pragmatis untuk menciptakan sertifikasi

hutan produksi. Saya berharap agar simposium ini dapat secara khusus merumuskan pemikiran-pemikiran untuk menyempurnakan konsep ekolabel yang telah dirumuskan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia, Departemen Kehutanan, dan APHI. Dengan demikian maka akan ada suatu rumusan teknis tentang kriteria dan indikator yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat diterapkan di lapangan.

Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam simposium sekarang ini. Akhirnya, bismillahirrahmanirrahim, dengan ini **Simposium Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi** saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Selamat bersimposium. Sekian, wassalamualaikum warakhmatullah wabarakatuh.

Jakarta, 10 Agustus 1995

Menteri Kehutanan,

Ir. Djamaludin Suryohadikusumo

RUMUSAN SIMPOSIUM

A. Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Berkelanjutan

A.1. Pengelolaan Hutan (Alam) Produksi Berkelanjutan merupakan penerapan perpaduan yang serasi antara prinsip ekologi dan ekonomi dalam memanfaatkan ekosistem sumberdaya hutan guna mendapatkan manfaat optimal yang bersifat dinamis dan serasi di antara manfaat-manfaat ekonomis, ekologis dan sosial budaya masyarakat secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan umat manusia. Guna mencapai tingkat pengelolaan seperti ini, sasaran yang perlu dicapai dalam mengelola hutan produksi adalah dapat diterapkannya azas-azas:

- a. Kelestarian hasil,
- b. Kelestarian perusahaan,
- c. Kelestarian ekosistem hutan, serta
- d. Kelestarian manfaat ekonomi dan sosial budaya masyarakat,

dengan ciri-ciri sebagai berikut :

a. Kelestarian hasil

- (1). Rata-rata besarnya hasil tahunan bagi hasil hutan utama yang diusahakan dari setiap kesatuan perusahaan hutan pada rotasi tebang tertentu serendah-rendahnya sama dengan rata-rata besarnya hasil tahunan pada rotasi tebang sebelumnya, atau :
- (2). Terbentuk hutan alam produksi normal
- (3). Terdapat keanekaragaman hasil maksimal dari yang mungkin diperoleh secara berkelanjutan.

b. Kelestarian perusahaan

Rata-rata besarnya hasil yang diperoleh dalam setiap rotasi tebangnya haruslah dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini berarti bahwa rata-rata besarnya hasil tahunan dalam setiap rotasi tebangnya serendah-rendahnya harus sama dengan besarnya hasil yang memungkinkan tercapainya BEP (*Break Even Point*).

c. Kelestarian ekosistem hutan

Keadaan, komposisi dan struktur hutan yang tercipta dapat menjamin fungsi ekologis ekosistem hutan yaitu dalam menunjang terselenggaranya aliran energi, siklus unsur hara, siklus hidrologi dan proses evolusi tumbuhan secara alami, serta pengendalian erosi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati jenis flora dan fauna (sumber plasma nutfah).

d. Kelestarian manfaat ekonomi dan sosial budaya masyarakat

Kegiatan perusahaan hutan harus dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan daerah, penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar hutan, serta dapat menjamin hak bagi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dan jasa yang dapat diperoleh dari hutan secara proporsional.

A.2. Tujuan Pengelolaan Hutan (Alam) Produksi yang Berkelanjutan sebagaimana diutarakan di muka, melalui pencapaian sasaran-sasarannya, hanya dapat terwujud apabila dapat dipenuhi beberapa prasyarat sebagai berikut :

- a. Tercipta alokasi sumberdaya hutan yang tepat, dengan kekuatan *de jure* dan *de facto* yang tinggi dan dipegang oleh seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.
- b. Tercipta iklim (IPOLEKSOSBUD) yang bersifat kondusif bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan yang bersifat profesional melalui penciptaan regulasi yang sesuai dan diikuti oleh penerapan prinsip reward and punishment yang tepat. Untuk mencapai keadaan ini, terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas, bersih dan berwibawa; baik yang berada pada pemerintah, perusahaan maupun masyarakat, merupakan syarat utama yang harus dipenuhi.
- c. Tercipta sumberdaya manusia yang berkualitas yang dapat menunjang bagi tersedianya :
 - (1). Aparat pemerintah yang berkemampuan tinggi, bersih dan berwibawa.
 - (2). Tenaga kerja perusahaan yang bersifat profesional dan memiliki kesadaran lingkungan tinggi.
 - (3). Masyarakat yang berkemampuan tinggi dan melek lingkungan.

- d. Tersedia paket-paket teknologi yang tepat, sesuai dengan keragaman keadaan hutan tropis yang sangat tinggi dalam tipe hutan, komposisi jenis, keadaan lapangan dan sosial budaya masyarakatnya yang diperoleh melalui kegiatan LITBANG yang terencana, terprogram dan berkelanjutan.
 - e. Tercipta sistem kelembagaan pengelolaan hutan yang dapat menjamin distribusi pendapatan, hak dan manfaat dari kegiatan perusahaan hutan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang bersifat proporsional.
 - f. Ada jaminan keberlangsungan usaha bagi para investor, baik yang berkenaan dengan keamanan kawasan hutan maupun kegiatan usahanya, dengan cara :
 - (1). Keamanan kawasan : kawasan hutan telah dikukuhkan dan diakui oleh seluruh pihak yang terkait, baik *de jure* maupun *de facto*.
 - (2). Keberlangsungan kegiatan usaha : memberikan jangka waktu usaha yang sesuai.
 - g. Terbentuk kesatuan perusahaan hutan yang tertata, sehingga memungkinkan diterapkannya prinsip-prinsip manajemen hutan yang tepat, sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh areal hutan yang akan diusahakan.
- A.3. Pencapaian tingkat pengelolaan hutan (alam) produksi berkelanjutan diharapkan akan dapat dipercepat dengan diterapkannya ecolabelling terhadap produk-produk turunan dari hasil hutan alam serta sertifikasi **LaHutTan** pada hutan alam produksi yang pada saat ini tengah dicanangkan oleh pemerintah dan didukung oleh pihak-pihak yang terkait.

B. Permasalahan dalam Mencapai Pengelolaan Hutan (Alam) Produksi Berkelanjutan

B.1. Permasalahan Umum

- a. Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang sekarang berjalan belum efektif, sebagai akibat dari :
 - (1). Sistem pengawasan belum tepat
 - (2). Kuantitas dan kualitas tenaga pengawas masih rendah
 - (3). Kuantitas dan kualitas fasilitas penunjang pengawasan masih rendah

- (4). Peraturan dan prosedur pengawasan terlalu kaku dan berbelit-belit
- b. Keamanan kawasan hutan masih rendah, sebagai akibat dari :
- (1). Kecepatan penyelesaian kegiatan pengukuhan hutan sangat rendah, sebagai akibat dari :
 - (a). Kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana di lapangan sangat rendah
 - (b). Kuantitas dan kualitas peralatan, khususnya alat ukur tanah, yang tersedia sangat rendah.
 - (c). Prosedur pengukuhan terlalu berbelit-belit dan bersifat birokratis
 - (d). Beberapa kriteria penentuan fungsi penggunaan hutan kurang tepat dan sulit dalam penerapannya di lapangan.
 - (2). Kekuatan *de facto* hasil pengukuhan hutan di lapangan sangat rendah, sehingga banyak areal kawasan hutan yang telah dikukuhkan tidak diakui oleh masyarakat.
 - (3). Aparat pengamanan hutan harus merupakan aparat terpadu antara aparat kehutanan, aparat daerah dan aparat HANKAM.
- c. Banyak kebijakan pemerintah yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan dapat menimbulkan rantai birokrasi yang panjang, berorientasi jangka pendek, bersifat inkonsisten satu sama lain, tidak dapat diterapkan di lapangan dan berdampak terhadap timbulnya biaya transaksi yang tinggi.
- d. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan, yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat, baik dalam penguasaan IPTEK yang menunjang kemampuannya untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dengan baik maupun pengetahuan, wawasan, kesadaran serta komitmennya dalam pemeliharaan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan hutan produksi.
- e. Perhatian dan penanganan dalam penyelenggaraan konservasi di hutan produksi, khususnya dalam hal pelestarian keunikan dan keanekaragaman hayati oleh para pengusaha dan tenaga pelaksana di lapangan masih sangat rendah, sebagai akibat dari :
- (1). Konsep penyelenggaraan konservasi di hutan alam produksi masih belum jelas dan belum bersifat operasional.

- (2). Kurangnya kesadaran dari para pemilik HPH terhadap pentingnya penyelenggaraan konservasi di hutan produksi sebagai akibat kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep konservasi di hutan produksi.
 - (3). Kurang tersedianya tenaga terampil di lapangan dalam bidang penyelenggaraan konservasi di hutan produksi.
- f. Masih terbatasnya ketersediaan paket teknologi alternatif yang sesuai untuk diterapkan di hutan alam produksi dengan keadaan yang spesifik, sebagai akibat dari kurang jelasnya konsep dan pelaksanaan program LITBANG dalam bidang Kehutanan dalam menunjang kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan.
 - g. Data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan manajemen hutan masih belum lengkap dan kurang mutakhir terutama data primer yang bersumber dari masing-masing kesatuan perusahaan atau yang keadaannya kira-kira sama.
 - h. Peran serta masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan hutan produksi masih rendah, sebagai akibat dari belum jelasnya hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan tersebut.
 - i. Tuntutan yang terlalu tinggi terhadap manfaat ekonomi hutan produksi dalam menunjang pengadaan devisa bagi negara, sehingga mengakibatkan terjadinya ketimpangan antara besarnya kapasitas terpasang industri pengolahan hasil hutan, terutama kayu, dengan kemampuan hutan produksi untuk menyediakan bahan bakunya. Kesenjangan ini diperparah oleh kurang berimbangannya penyebaran letak industri pengolahan kayu antar propinsi di Indonesia.
 - j. Sistem pembentukan harga kayu bulat yang terjadi pada saat ini masih belum memperhatikan biaya untuk penyelenggaraan konservasi di hutan produksi, sehingga biaya yang diperlukan untuk kegiatan tersebut masih belum dapat terjamin dari harga jual hasil yang diperoleh.
 - k. Sebagian besar hutan produksi pada saat ini memiliki keadaan tegakan yang tidak ideal dalam membentuk hutan normal sebagai akibat ketidakteraturan pelaksanaan pemanenan kayu dalam periode perusahaan hutan 20 tahun yang pertama.

B.2. Permasalahan Khusus dalam Menghadapi Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi (Sertifikasi LaHutTan)

- a. Persepsi, pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dan kepentingan ecolabel di hutan produksi yang dianut oleh pemerintah, pengusaha dan masyarakat masih belum seragam.
- b. Belum tersedianya kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi berkelanjutan yang bersifat harmonis dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- c. Belum tersedianya acuan dan langkah-langkah yang bersifat strategis dalam pelaksanaan penerapan ecolabel di hutan produksi yang dapat dipakai sebagai pedoman bagi pemerintah, pemegang HPH dan masyarakat.
- d. Belum tersedianya tenaga kerja yang profesional dalam pelaksanaan ecolabel di hutan produksi baik dalam pemerintah (pengawas), lembaga penyelenggara dan pelaksana penilaian (asesor).
- e. Belum adanya kejelasan mengenai posisi, hak dan kewajiban dari setiap lembaga yang terkait dalam kegiatan penyelenggaraan ecolabel di hutan produksi.

C. Rekomendasi

Guna mencapai tujuan pengelolaan hutan produksi lestari dan dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi, simposium merekomendasikan strategi yang dapat ditempuh sebagai berikut :

1. Strategi Umum

- a. Penyempurnaan alokasi penggunaan sumberdaya hutan secara nasional dengan memperhatikan kepentingan sektor lain yang terlibat dan jaminan tersedianya tempat usaha bagi masyarakat di sekitar hutan, sehingga kesenjangan antara sediaan dan permintaan kayu bulat dapat diatasi.
- b. Mempercepat penyelesaian pengukuhan hutan yang mencakup kegiatan-kegiatan : pemancangan batas sementara, musyawarah dengan pihak-pihak terkait, pemancangan batas tetap dan pembuatan berita acara serta pembuatan surat keputusannya (oleh Menteri Kehutanan), melalui :

- (1). Penentuan areal pengukuhan yang tepat, yaitu kesatuan perusahaan hutan produksi
 - (2). Peningkatan keterampilan tenaga pelaksana di lapangan
 - (3). Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan pengukuran di lapangan
 - (4). Penyederhanaan birokrasi dan prosedur kerja pengukuhan hutan tanpa mengabaikan keterlibatan pihak-pihak yang terkait.
- c. Penyempurnaan dan penyederhanaan peraturan, terutama pada tingkat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi dengan memperhatikan :
- (1). Kekhususan bagi keadaan-keadaan hutan yang bersifat spesifik
 - (2). Keluwesan dalam kemungkinan penerapan prinsip-prinsip manajemen hutan yang benar yang merupakan perpaduan antara penerapan konsep IPTEK Kehutanan dan seni.
- d. Mewujudkan terbentuknya kesatuan-kesatuan perusahaan hutan produksi yang berlandaskan kepada konsep yang bersifat komprehensif dan holistik dalam memperhatikan aspek-aspek yang terkait dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi dengan cara menindak lanjuti seluruh hasil penelitian dan kajian yang pernah dilakukan dalam pembangunan Kesatuan Perusahaan Hutan Produksi.
- e. Peningkatan upaya pengawasan dan penegakan peraturan dengan menerapkan prinsip *reward and punishment*.
- f. Penyempurnaan konsep penyelenggaraan konservasi di hutan alam produksi yang bersifat rasional dan operasional dengan tetap mempertahankan kemungkinan terjaganya kualitas lingkungan, khususnya keterpeliharaan keaneka ragam hayati hutan alam tropis.
- g. Peningkatan kualitas penyelenggaraan LITBANG Kehutanan melalui penyempurnaan konsep, tujuan dan program yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Untuk tujuan ini, perhatian khusus dalam bentuk dana, pemberian insentif yang memadai kepada para peneliti dan pengadaan fasilitas penunjang penelitian sangat diperlukan.
- h. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi, secara proporsional, yaitu pemerintah, pengusaha, LSM dan lembaga-lembaga terkait lainnya serta masyarakat. Penyelenggaraan kursus, DIKLAT dan penyuluhan dengan materi yang sesuai dengan kualifikasi dari setiap komponen pihak yang terkait tersebut perlu digalakkan.

- i. Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan pengelolaan hutan produksi, baik untuk penyusunan rencana maupun perumusan kebijakan lainnya, melalui :
 - (1). Standardisasi macam, satuan dan nilai
 - (2). Menjaga kemutakhiran dan keberlanjutan data dan informasi yang bersifat serial
 - (3). Pemberian pelayanan kepada pengguna melalui Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi yang memadai.
- j. Peningkatan intensitas manajemen dalam kegiatan pengelolaan hutan alam produksi dengan menggunakan alternatif teknologi yang tepat dan memadai.

2. Strategi Khusus dalam Menghadapi Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi

- a. Merumuskan kriteria dan indikator pengelolaan hutan alam produksi yang dapat diterima oleh berbagai pihak yang berkepentingan dan bersifat rasional, dapat diterapkan, dilaksanakan dan diukur di lapangan.
- b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep ekolabel di hutan alam produksi (sertifikasi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, **LaHutTan**) bagi para pengusaha, pejabat pemerintah dan masyarakat.
- c. Peningkatan keterampilan asesor dan tenaga pelaksana pengelola hutan di lapangan melalui pengembangan tenaga profesional.
- d. Penyebarluasan informasi hasil penilaian terhadap konsep yang telah ada dan status keragaan HPH-HPH yang pernah dinilai dalam uji coba penerapan ekolabel di hutan produksi kepada masyarakat, khususnya yang terkait langsung dengan kegiatan pengelolaan hutan produksi.